

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan sektor yang dipercaya sebagai kunci kemajuan di dalam suatu Negara. Seperti yang sudah ada di dalam Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sebagaimana dalam peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan baik dalam sarana prasarana, tenaga pengajar, fasilitas pembelajaran dari segi peningkatan mutu pendidikan dan segi pembiayaan pemerataan di semua jenjang bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 yang berisi, pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang harus mendapat prioritas dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

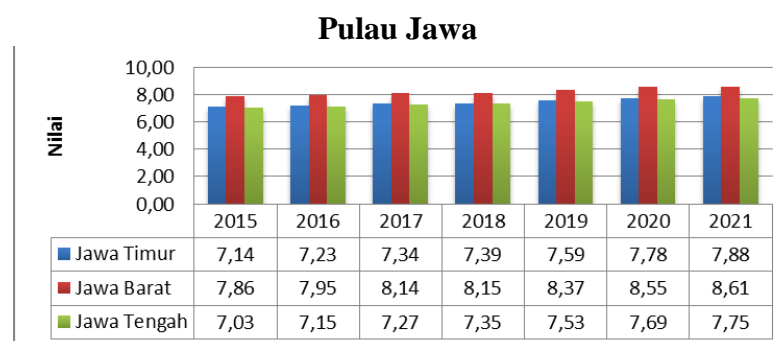
Pendidikan merupakan isu sentral dalam pembangunan berpusat pada rakyat karena salah satu premis pentingnya adalah memperbesar pilihan-pilihan bagi rakyat. Melalui pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan sumber daya manusia, untuk kemudian dapat dimanfaatkan berpartisipasi dalam proses pembangunan (Zulfahmi Pratama, 2016).

Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis. Pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang

berkualitas. Pendidikan menjadi salah satu investasi penting dalam pembangunan ekonomi dan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. The human capital theory menyatakan bahwa pendidikan menanamkan banyak hal bagi siapa saja yang merasakannya. Hal ini lah yang kemudian memungkinkan mereka mengejar tingkat pendidikan dan pelatihan yang lebih tinggi dan meningkatkan pendapatan masa depan mereka dengan meningkatkan penghasilan seumur hidupnya (Tomi Mandala Putra, 2019).

Jika melihat situasi saat ini, penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur masih jauh dari efisien. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat bahwa di Jawa Timur masih banyaknya pengangguran yang disebabkan karena kualitas pendidikan yang mereka terima kurang efektif dan efisien. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Jawa Timur dikarenakan masih banyaknya anak yang putus sekolah sehingga berpengaruh terhadap rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan minimnya sekolah serta guru yang akan mengajar. Maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan kualitas yang baik.

**Gambar 1.1 Perbandingan Tingkat Pendidikan antar Provinsi di**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar diatas menjelaskan bahwa tingkat pendidikan di Jawa Barat lebih unggul dibandingkan di Jawa Timur. Sebagaimana yang diperkuat di dalam UUD Pasal 31 ayat 4 Amandemen ke-4 yang berisi dimana Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional. Tugas dan kewajiban dari pemerintah daerah yakni dengan menyediakan barang serta jasa yang berpengaruh pada makin terbatasnya penduduk di suatu wilayah tertentu. Di samping itu, pemerintah pusat maupun daerah wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dalam segi pengaturan, pelayanan, dan perlindungan terhadap masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Dengan berlakunya otonomi daerah, maka pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang didasarkan oleh asas dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, jumlah daerah otonomi di indonesia semakin bertambah, hal ini menyebabkan peningkatan kemampuan merespon untuk masyarakat di daerah, yang seharusnya sudah dapat memperbaiki efisiensi dan kualitas penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat. Namun, dengan cara melalui desentralisasi, pemerintah Indonesia bermaksud untuk memperbaiki efisiensi pengeluarannya dengan memperhatikan perencanaan dan penyediaan layanan publik dengan cara mempertimbangkan kebutuhan (permintaan), anggaran yang dikeluarkan,

serta hasil yang dicapai di suatu daerah yang bertujuan untuk perkembangan sosial-ekonomi daerah dan nasional. Dilihat dari Rencana Strategis Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan satuan pendidikan secara terpadu yang dikoordinasikan secara terpusat dengan cara memanfaatkan teknologi komunikasi dalam penyelenggaraan pendidikan (pembelajaran jarak jauh, broadcasting-radio, dan TV Pendidikan).

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan dengan desentralisasi fiskal. Maka kebijakan tersebut akan memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah. Dimana dipergunakan untuk mengatur keuangan sesuai potensi daerah masing-masing (Adissya Mega Christia, 2019). Dengan demikian diharapkan desentralisasi fiskal mampu meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah.

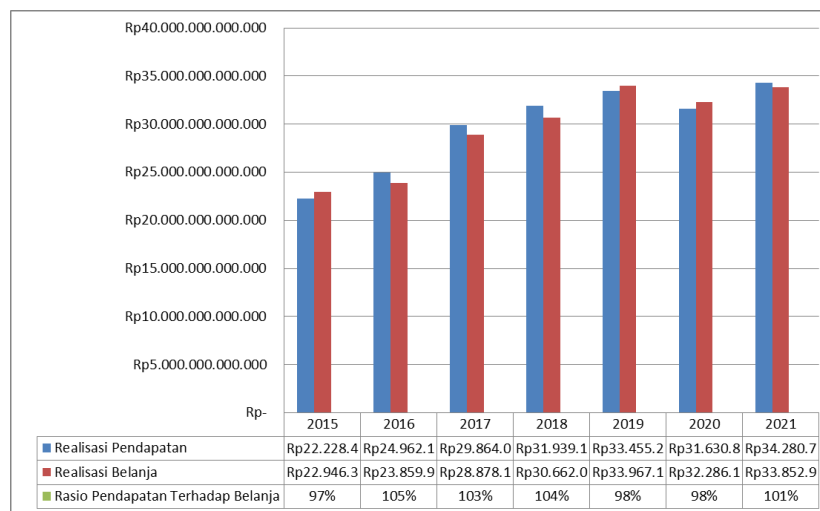
Efisiensi pengeluaran sudah dapat dikatakan bisa tercapai apabila pemerintah daerah benar-benar memperhatikan kebutuhan dan preferensi masyarakat di daerahnya yang tentu diperlukan sumber daya manusia untuk merancang dan menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dengan baik.

Namun dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi tidak selalu diikuti dengan peningkatan efisiensi pengeluaran, karena ada beberapa kendala yang menghambat efisiensi pengeluaran tersebut, contohnya seperti sumber daya alam yang tidak menunjang dan sumber daya manusia yang

tidak profesional sehingga tidak dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penerapan kebijakan desentralisasi yang salah satunya meningkatkan efisiensi biaya layanan publik (pengeluaran pemerintah), maka poin pentingnya yaitu efisiensi pengeluaran pemerintah merupakan pokok dari bahasan yang sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih di era otonomi daerah pada saat ini. Terlebihnya lagi dalam pengeluaran publik di sektor yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat seperti halnya pendidikan.

**Gambar 1.2 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Triliun Rupiah) Tahun 2015-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa rasio pendapatan terhadap belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Tahun 2016,2017,2018, dan 2021 mengalami surplus anggaran. Hal ini dapat dikatakan bahwa ditahun 2016,2017, 2018, dan 2021 realisasi pendapatan yang diperoleh sudah dapat mencukupi belanja daerah.

Sedangkan rasio pendapatan terhadap belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Tahun 2015, 2019 dan 2020 mengalami defisit anggaran atau realisasi pendapatan yang diperoleh belum mencukupi belanja daerah. Jika dilihat dari segi pendapatan maka di Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur memperoleh pendapatan sebesar 34,28 Triliun Rupiah. Sedangkan di tahun 2015 pendapatan terendah pada Provinsi Jawa Timur sebesar 22,22 Triliun Rupiah.

Data diatas menunjukkan bahwa belanja yang efisien dapat mendorong kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, efisiensi dapat terjadi ketika dana yang tersedia dapat memberikan pelayanan yang baik dan optimal sehingga mampu menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur serius dalam pembangunan sarana dan prasarana dalam sektor pendidikan, karena pendidikan merupakan modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks anggaran berbasis kinerja maka pengukuran efisiensi pengeluaran pemerintah daerah merupakan sesuatu yang *urgent* untuk melihat kinerja pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran sehingga memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Efisiensi dalam pengeluaran pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi relokasi sumber daya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal. Ketika kondisi tersebut

terpenuhi, maka dikatakan pengeluaran pemerintah telah mencapai tingkat yang efisien (Muhamad Rusmin Nuryadin, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh peran pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur melalui kebijakan pengeluaran di sektor pendidikan, serta mengukur efisiensi kinerja pemerintah khususnya dalam pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : **“EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TIMUR”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang ingi kami kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015-2021 ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang sudah disebutkan diatas , maka tujuan dari penelitian ini adalah :

“Untuk mengetahui tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015-2021.”

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi masyarakat, dan bagi pihak-

pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a) Untuk penulis, penelitian ini bisa memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan terkait dengan efisiensi belanja pemerintah di sektor pendidikan khususnya di Provinsi Jawa Timur.
- b) Untuk pemerintah dan pihak yang terkait, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan instansi yang terkait agar dapat mengetahui seberapa efisiensi belanja pemerintah pada sektor pendidikan.
- c) Untuk ilmu pengetahuan, penelitian ini menjadi dasar acuan bagi para peneliti lain untuk pengembangan penelitian selanjutnya dalam belanja pemerintah khususnya dalam sektor pendidikan.